

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak inklusi keuangan, infrastruktur digital, serta kondisi makroekonomi wilayah terhadap ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Secara umum, perluasan inklusi keuangan dan masifnya infrastruktur digital di era pascapandemi 2022 belum beroperasi sebagai alat pemerataan ekonomi yang efektif. Kegagalan ini bersumber dari adanya *digital divide* serta bias inovasi yang lebih berpihak pada kelompok *skilled labor*. Akibatnya, alih-alih menetes ke kelompok rentan (*trickle-down effect*), kemajuan ekonomi digital justru tertahan karena masalah kemiskinan struktural terus membatasi kemampuan masyarakat prasejahtera untuk memonetisasi akses teknologi tersebut.

Sebaliknya, struktur ekonomi yang dibayangi oleh tingginya angka kemiskinan terbukti menjadi penentu utama yang paling mendominasi arah ketimpangan pendapatan. Kondisi prasejahtera memicu fenomena perangkap kemiskinan yang menghalangi masyarakat bawah untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, maupun modal kerja yang produktif. Kesimpulan utamanya adalah ketimpangan distribusi pendapatan antarprovinsi di Indonesia akan terus melebar secara signifikan seiring dengan tingginya proporsi penduduk miskin, terlepas dari seberapa pesat adopsi digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi agregat di wilayah tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa hambatan dan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti. Pertama, penelitian ini berfokus pada data *cross-section* terbatas pada satu periode pengamatan tunggal, sehingga analisis belum dapat menangkap efek dinamis dan tren jangka panjang dari dampak digitalisasi yang biasanya membutuhkan waktu untuk memengaruhi struktur pendapatan. Kedua, dalam proses pengolahan data awal, model regresi sempat terindikasi mengalami gangguan asumsi klasik berupa heteroskedastisitas akibat

tingginya variasi data makroekonomi antarprovinsi. Meskipun demikian, kendala ini telah berhasil diatasi secara metodologis melalui penerapan estimasi *Huber-White Robust Covariance*, sehingga hasil pengujian hipotesis tetap terbukti konsisten, efisien, dan sama sekali tidak melemahkan keabsahan maupun signifikansi dari temuan akhir penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi temuan yang diperoleh, terdapat beberapa saran praktis dan teoretis yang diajukan dalam penelitian ini:

5.3.1 Saran Praktis

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, temuan ini memberikan implikasi konkret bahwa pembangunan infrastruktur fisik digital tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi pemerataan. Kebijakan pemecahan masalah harus diarahkan secara terarah pada intervensi kemiskinan struktural. Pemerintah disarankan untuk merancang program pemberdayaan ekonomi riil yang diintegrasikan dengan literasi digital yang tepat sasaran. Akses internet dan lembaga keuangan (seperti pinjaman online resmi atau layanan perbankan digital) perlu diarahkan pada sektor produktif masyarakat kelas bawah seperti pendampingan UMKM dan akses kredit modal usaha, bukan sekadar memfasilitasi kemudahan konsumtif yang justru membebani finansial kelompok rentan.

5.3.2 Saran Teoretis

Bagi pengembangan keilmuan dan peneliti selanjutnya di bidang ekonomi pembangunan, disarankan untuk mengembangkan model penelitian ini dengan menggunakan pendekatan data panel yang mencakup rentang waktu pengamatan yang lebih panjang, misalnya 5-10 tahun terakhir. Kajian lanjutan juga sangat direkomendasikan untuk menambahkan indikator variabel yang lebih spesifik mengenai kualitas penggunaan teknologi, seperti Indeks Literasi Digital atau proporsi penggunaan internet untuk tujuan transaksi finansial, guna membedah lebih dalam perbedaan dampak antara sekadar memiliki akses teknologi dengan kemampuan memonetisasi teknologi tersebut.